

**Afiliasi:**

- 1 Universitas Samudra
- 2 Universitas Syiah Kuala
- 3 Universitas Syiah Kuala
- 4 Universitas Samudra

***Korespondensi:**

syukriyabdullah@usk.ac.id

DOI: 10.24853/jago.4.2.197-218

SITASI:

Haura, G., A., Abdullah, S., Meutia, R., & Junita, A. (2024). Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Barang dan Jasa dan Efek Moderasi Financial Distress pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 4(2), 197-218

Proses Artikel:

Diterima:
09/01/2024
Revisi:
31/01/2024
Disetujui:
31/01/2024



Attribution-NonCommercial
4.0 International (CC BY-NC
4.0)

JAGo Website:



Article Type: Empirical

Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Barang dan Jasa dan Efek Moderasi Financial Distress pada Pemerintah Daerah

Ghina Adhha Haura¹⁾, Syukriy Abdullah^{2)*}, Rita Meutia³⁾,
Afrah Junita⁴⁾

Abstract

Objectives: *This study seeks to investigate the impact of SiLPA budget changes on adjustments in the goods and services budget, with financial distress serving as a moderator in Indonesian district/city governments.*

Design/method/approach: *Employing a quantitative methodology, the sample comprises 42 district/city governments in Indonesia that encountered financial distress and underwent budget changes during the 2019 fiscal year. Hypothesis testing involved multiple linear regression models and Moderated Analysis Regression (MRA), utilizing historical documents data from the Regional Revenue and Expenditure Budget (RREB) -Year Change of 2019, and the Regional Government Financial Report (RGFR) from 2016 to 2018.*

Results/findings: *The multiple linear regression model outcomes indicate that alterations in the SiLPA budget and financial distress collectively influence adjustments in the goods and services budget. Furthermore, MRA results demonstrate that financial distress moderates the impact of SiLPA budget changes on adjustments in the goods and services budget.*

Theoretical contribution: *The application of punctuated equilibrium theory (PET) is proposed as a valuable reference in comprehending regional budget changes.*

Practical contribution: *The study employs a relatively small sample size, as the data is sourced from the 2019 LKPD, considering regional governments with a deficit in the LO for three consecutive years. Additionally, limited secondary data spans only one budget year, and the regression model features only one independent variable, despite previous studies highlighting the multifaceted influences on changes in regional budgets (Abdullah, 2013; Marzalita, et al., 2014; Martunis, et al., 2014; Junita, 2015; Abdullah, et al., 2020).*

Limitations: *The use of small samples occurred because the data used was sourced from LKPD in 2019, with the criteria of local governments experiencing deficits in LO for three consecutive years. Limited secondary data, which is only one budget year. The use of regression models with only one independent variable, while in previous studies it was shown that changes in regional budgets were influenced by many factors (Abdullah, 2013; Marzalita, et al., 2014; Martunis, et al., 2014; Junita, 2015; Abdullah, et al., 2020).*

Keywords: *Budget Deficit, Financial Pressure, Changes in Regional Budgets, Spending on Goods and Services, Financial Performance.*

Abstrak

Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh Perubahan Anggaran SiLPA terhadap Perubahan Anggaran Barang dan Jasa dengan menggunakan *Financial Distress* sebagai pemoderasi pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

Desain/metode/pendekatan: Penelitian bersifat kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah 42 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang mengalami financial distress dan melakukan perubahan anggaran pada tahun anggaran 2019. Model regresi linier berganda dan Moderated Analysis Regression (MRA) digunakan dalam pengujian hipotesis dengan menggunakan data historis dari dokumen APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2019 dan LKPD dari tahun 2016 sampai dengan 2018.

Hasil penelitian: Hasil dengan model regresi linier berganda menunjukkan bahwa perubahan Anggaran SiLPA dan financial distress mempengaruhi perubahan anggaran barang dan jasa. Sedangkan hasil dengan menggunakan MRA menunjukkan bahwa financial distress memoderasi pengaruh perubahan anggaran SiLPA terhadap perubahan anggaran barang dan jasa.

Kontribusi teori: Penggunaan teori keseimbangan bersela (*punctuated equilibrium theory/PET*) dapat menjadi rujukan dalam konteks perubahan anggaran daerah.

Kontribusi praktik/kebijakan: Pemerintah daerah dapat membuat kebijakan terkait dengan penggunaan SiLPA dalam anggaran perubahan.

Keterbatasan: Penggunaan sampel kecil yang terjadi karena data yang digunakan bersumber dari LKPD tahun 2019, dengan kriteria Pemda yang mengalami defisit dalam LO tiga tahun berturut-turut. Data sekunder yang terbatas, yakni hanya satu tahun anggaran. Penggunaan model regresi dengan hanya satu variabel bebas, sementara dalam studi terdahulu ditunjukkan bahwa perubahan anggaran belanja daerah dipengaruhi oleh banyak faktor (Abdullah, 2013; Marzalita, et al., 2014; Martunis, et al., 2014; Junita, 2015; Abdullah, et al., 2020).

Kata Kunci: Defisit anggaran, tekanan finansial, perubahan anggaran daerah, belanja barang dan jasa, kinerja keuangan.

PENDAHULUAN

Salah satu tahap penting dalam penganggaran pada organisasi pemerintahan adalah revisi anggaran dalam tahun berjalan (*rebudgeting*). Revisi anggaran di pemerintahan daerah (Pemda) dapat dilakukan pada saat anggaran dilaksanakan untuk menjamin bahwa semua target prioritas dapat tercapai di tengah-tengah kondisi yang tidak pasti, serta untuk meningkatkan kinerja anggaran (Abdullah, et al., 2020). Ketidakpastian dalam pengelolaan anggaran pemerintah dapat muncul dari beberapa faktor, seperti siklus tahunan, kelemahan dalam prediksi, sentralisasi

kebijakan, kontrol atas birokrasi, kompleksitas dalam politik, serta erosi akuntabilitas publik (Anessi-Pessina, et al., 2008). Selain itu, proses perubahan anggaran memiliki keterkaitan dengan beberapa faktor internal, misalnya inkrementalisme, sistem perpolitikan, struktur organisasi, kondisi keuangan daerah, dan lingkungan sosial ekonomi (Anessi-pessina & Bergamo, 2013).

Asas desentralisasi memberikan kewenangan yang luas kepada setiap Pemda untuk mengelola anggaran mereka sendiri, termasuk dalam hal pembuatan kebijakan, prioritas, serta teknis penyusunan anggaran dan perubahannya (Widyaningrum, et al., 2019). Pada praktiknya, Pemda boleh melakukan perubahan anggaran belanja, termasuk belanja barang dan jasa (BBJ) selama tahun berjalan (Marzalita, et al., 2014; Abdullah, 2018). Perubahan BBJ, seperti halnya jenis belanja lainnya, melibatkan keputusan politik yang melibatkan DPRD. Namun, pengelolaan BBJ rentan dengan penyalahgunaan, karena barang yang diperoleh mudah untuk digelapkan dan dipindahtangankan, serta pertanggungjawabannya relatif mudah dilakukan.

Perubahan anggaran BBJ bersifat strategis dan penting karena menjadi alternatif untuk menghabiskan anggaran (Marzalita, et al., 2014). Perubahan anggaran memiliki latar belakang dan sebab yang berbeda-beda (Sari, et al., 2022). Menurut Abdullah (2013), perubahan anggaran BBJ disebabkan oleh perubahan karena adanya varian SiLPA. Tingginya SiLPA menggambarkan bahwa Pemda belum mampu melakukan penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan program anggaran sebagaimana semestinya, sehingga ada dana tidak teralokasikan secara tepat (Wiguna & Jati, 2019). Rendahnya realisasi BBJ dan adanya program dan kegiatan yang tidak terlaksana, menyebabkan sisa anggaran yang besar di Pemda (Rahayu, et al., 2014).

Penganggaran belanja daerah yang tidak tepat menyebabkan Pemda mengalami kesulitan keuangan atau *financial distress* (FD) (Ansori, 2021; Sari et al., 2022). Trussel & Patrick (2012) berpendapat bahwa Pemda mengalami defisit selama minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut, diindikasikan mengalami FD. Pemda yang mengalami FD akan mengurangi belanja administrasi (Forrester & Spindler, 1988; Honadle, et al., 2004), belanja operasional (Pagano, 1993), belanja pemeliharaan (Bumgarner, et al., 1991), mencari bantuan pemerintah pusat (Lucier, 2014), serta tidak mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada publik (Cohen, et al., 2017; Maher & Deller, 2007). Belanja Pemda dapat terindikasi mengalami FD dikarenakan lebih banyak untuk pengeluaran rutin atau operasional, sehingga berpengaruh terhadap komposisi dan prioritas belanja (Illahi, et al., 2021).

FD pada Pemda terjadi di seluruh dunia, seperti Amerika Serikat, Eropa dan Inggris (Mesa-lago & Vidal-alejandro, 2011; Paulais, 2009), termasuk Indonesia (Ansori, 2021). Temuan Ansori (2021) menunjukkan bahwa dari 508 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dari tahun 2014-2019, terdapat 108 Pemda mengalami FD. Selain itu, fenomena perubahan anggaran terjadi pada hampir seluruh Pemda di Indonesia setiap tahunnya (Marzalita, et al., 2014). Secara nasional, besaran jumlah pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang mengalami FD dan perubahan anggaran dapat dilihat Tabel 1.

Tabel 1.
Perubahan Anggaran SiLPA, Perubahan Anggaran Belanja Barang dan Jasa dan
***Financial Distress* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2019**

No	Pemerintah Daerah	Financial Distress (Rp)	Perubahan SiLPA (Rp)	Perubahan BBJ (Rp)
1	Kab. Konawe	-133.551.085.170	-4.802.201.147	-10.917.006.350
2	Kab. Kep. Tanimbar	-53.641.364.829	-95.789.704.209	-1.171.827.034
3	Kab. Magelang	-279.042.464.639	150.939.421.152	11.562.242.692
4	Kab. Rembang	-285.854.303.036	26.455.417.697	39.615.263.454
5	Kab. Sragen	-57.817.845.254	172.471.534.329	111.098.152.735
6	Kab. Subang	-178.711.747.640	-85.808.246.927	113.900.869.113
7	Kota Cirebon	-110.127.348.545	-13.850.013.453	50.690.240.626
8	Kota Tasikmalaya	-226.115.013.805	-65.496.656.804	68.277.016.775

Sumber: Ansori (2021); Kemenkeu (2022).

Tabel 1. menyajikan informasi tentang Pemda yang mengalami FD dan melakukan perubahan anggaran, yang dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni: *Pertama*, Pemda yang mengalami FD dan terjadi perubahan SiLPA serta menunjukkan arah yang negatif dengan perubahan anggaran BBJ. Hal ini terjadi pada Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. *Kedua*, Pemda yang mengalami FD dan terjadi perubahan SiLPA serta menunjukkan perubahan yang searah (positif) dengan perubahan anggaran BBJ dengan. Hal ini terjadi pada 3 (tiga) daerah sebagai contoh yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Sragen. *Ketiga*, Pemda yang mengalami FD dan terjadi perubahan SiLPA serta menunjukkan perubahan yang tidak searah atau sejalan dengan perubahan anggaran BBJ Hal ini terjadi pada 3 (tiga) daerah sebagai contoh yaitu Kabupaten Subang, Kota Cirebon, dan Kota Tasikmlaya.

Hasil penelitian Iswahyudin (2016) yang menunjukkan bahwa alokasi BBJ mempunyai pengaruh signifikan terhadap SiLPA. Semakin besar BBJ yang terealisasi maka akan semakin kecil SiLPA pada akhir tahun begitu juga sebaliknya semakin kecil BBJ yang terealisasi maka SiLPA pada akhir tahun akan besar walaupun pembiayaan netto juga mempengaruhi nilai SiLPA. Marzalita, et al. (2014) menyatakan bahwa adanya pengaruh antara perubahan anggaran SiLPA terhadap perubahan anggaran BBJ. Hal ini membuktikan bahwa Pemda berhasil menggunakan SiLPA untuk pelaksanaan program/kegiatan pelayanan publik.

Aditya & Dirgantari (2017) dan Abdullah, et al. (2020) menemukan bahwa SiLPA tidak berpengaruh terhadap belanja. Besaran sisa anggaran tahun sebelumnya yang ditetapkan untuk tahun anggaran berjalan biasanya belum pasti atau masih dalam bentuk ramalan (*forecast*), sehingga membutuhkan kajian yang lebih jauh mengenai sisa anggaran pada tahun anggaran berikutnya, yang memang belum dapat dipastikan (Abdullah & Rona, 2014). Itulah sebabnya mengapa perlu dilakukan perubahan untuk anggaran SiLPA di tahun berjalan.

FD dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah memperoleh penerimaan dari pendapatan untuk membayari belanjanya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Artinya, pemerintah kabupaten/kota dianggap mengalami FD ketika mengalami defisit anggaran selama tiga tahun berturut-turut. Defisit terjadi apabila jumlah realisasi pendapatan lebih kecil daripada jumlah realisasi belanja (Abdullah, 2018). Pemda yang mengalami FD biasanya memprediksi anggaran belanja yang lebih besar dari seharusnya dan melakukan perubahan selama tahun berjalan (Anessi-Pessina & Sicilia, 2015). Target tahun sebelumnya yang menguntungkan (*favorable*) akan diduplikasi untuk tahun anggaran yang berjalan atau disebut dengan *budget ratcheting* (Abdullah & Junita, 2016).

Wang, et al. (2007) menyatakan bahwa FD yang tinggi berpengaruh terhadap penurunan anggaran belanja Pemda. Di sisi lain, perencanaan dan penganggaran belanja daerah yang berlebihan dan kurang tepat dapat menyebabkan pemerintah kabupaten/kota mengalami FD (Ansori, 2021). Hasil penelitian Jones & Walker (2007) menunjukkan bahwa respon terhadap FD yang kuat dapat mendorong penurunan biaya pemeliharaan, sehingga pemda harus memiliki komitmen untuk menghindari terjadinya FD (Ansori, 2021).

Perubahan anggaran BBJ pemerintah penting untuk dianalisis dengan menggunakan perspektif yang berbeda. Penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan anggaran BBJ. Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penelitian ini menjadi sangat menarik karena dilakukan dalam konteks Pemda di Indonesia dan penelitian sebelumnya belum banyak yang mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan BBJ pada Pemda. Pemilihan FD sebagai pemoderasi dikarenakan pemerintah yang mengalami FD tidak dapat menyediakan pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan yang ditetapkan, sehingga kondisi selalu menjadi bagian penting dalam penyusunan APBD.

KAJIAN LITERATUR

Penyusunan anggaran oleh pemerintah daerah dimaksudkan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan kelompok masyarakat yang bersaing karena adanya keterbatasan sumber daya (Rubin, 2014). Alokasi anggaran tidak konstan dari waktu ke waktu sehingga perubahan alokasi anggaran dapat terjadi pada saat anggaran tersebut dilaksanakan. Pola alokasi anggaran pemerintah sering dijelaskan dengan menggunakan teori keseimbangan bersela (*punctuated equilibrium theory/PET*), termasuk untuk mengkaji tentang perubahan anggaran (Alshoubaki & Harris, 2020; Citi, 2013; Fernández-i-Marín, et al., 2019; Flink, 2017; Guragain & Lim, 2019; Kovari, 2016; Matzke, 2020; Park & Sapotichne, 2019; Sebók & Berki, 2017; Sebók & Berki, 2018; Silvestre et al., 2021; Wordliczek, 2021).

Secara garis besar, teori PET ini digunakan untuk mengetahui bahwa anggaran belanja dapat berubah dan bergeser karena dipengaruhi oleh perubahan prioritas kebijakan atau karena terdapat alasan politis. Gejala perubahan anggaran tidak selalu menunjukkan pola yang sama di semua tingkat pemerintahan. Anggaran daerah sangat dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi, keuangan daerah, demografi dan situasi sosial ekonomi lainnya yang juga mempengaruhi komposisi alokasi pengeluaran publik (Jordan, 2002:213). Teori PET menawarkan penjelasan yang masuk akal untuk perubahan anggaran dan kebijakan anggaran (Guragain & Lim, 2019).

Perubahan Anggaran (*Rebudgeting*)

Perubahan anggaran adalah cara yang dilakukan pemerintah untuk melakukan merevisi penerapan anggaran sebagai kelanjutan dari proses anggaran tahunan (Junita, 2015). Proses perubahan anggaran merupakan hal lazim sekaligus menjadi faktor yang penting di Pemda (Forrester & Mullins, 1992). Alesani (2012) mendefinisikan perubahan anggaran sebagai proses orientasi manajemen terhadap perencanaan dan penanganan tanggap darurat. Perubahan setiap komponen anggaran memiliki latar belakang dan alasan berbeda. Ada perbedaan alasan untuk perubahan anggaran pendapatan, perubahan anggaran belanja dan perubahan pembiayaan, kecuali untuk SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu), yang memang menjadi salah satu alasan utama mengapa perubahan anggaran dilakukan (Abdullah, 2013). Penjelasan dari Pasal 154 Angka 1 Permendagri Nomor 13 tahun 2006, perubahan anggaran dapat dilakukan apabila terjadi (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan perubahan anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih pada tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; (4) Keadaan darurat; dan (5) Keadaan luar biasa.

Anggaran Belanja Barang dan Jasa (BBJ) dan Perubahannya

Anggaran BBJ di APBD diuraikan dalam rekening objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang atau jasa yang diberikan kepada pihak lain. Abdullah (2013) menyatakan bahwa terdapat beberapa bentuk perubahan alokasi untuk belanja barang dan jasa berdasarkan penyebabnya sebagai berikut (1) Perubahan karena adanya varian SiLPA, perubahan dilakukan apabila prediksi atas SiLPA tidak akurat; (2) Perubahan karena adanya pergeseran anggaran (*virement*), pergeseran anggaran ini dapat terjadi dalam satu SKPD, meskipun total alokasi untuk SKPD yang bersangkutan berada di posisi tidak berubah; (3) Perubahan komponen penerimaan, khususnya pendapatan. Proses penyusunan anggaran barang dan jasa setiap tahun sudah mulai dipersiapkan pada bulan Juli, apabila pada pelaksanaan terjadi perkembangan yang memerlukan penyesuaian, maka akan dilakukan perubahan anggaran.

Anggaran SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dan Perubahannya

Sisa lebih anggaran ditahun sebelumnya yang menjadi penerimaan pada tahun berjalan (SiLPA) merupakan sumber penerimaan internal Pemda yang digunakan untuk mendanai kegiatan tahun berjalan. Secara konsep, SiLPA akan digunakan menutupi defisit, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atau membiayai belanja langsung serta mendanai kewajiban lainnya yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran terdahulu (Abdullah, 2013). Ketika besaran realisasi surplus atau defisit dalam APBD berjalan berbeda dengan anggaran yang telah ditetapkan sejak awal tahun anggaran, maka diperlukan penyesuaian anggaran penerimaan pembiayaan, setidaknya untuk mengkoreksi penerimaan apa saja yang bersumber SiLPA (Junita, 2015).

***Financial Distress* (FD)**

Financial distress (FD) terjadi ketika Pemda tidak dapat mempertahankan tingkat pelayanan yang sudah ada sebelumnya (Jones & Walker, 2007), keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk layanan publik (Douglas & Gaddie, 2002; Hendrick, 2004; Hou, 2003),

ketidaksesuaian antara sumber daya yang tersedia dengan pengeluaran yang dibutuhkan untuk pelayanan (Capalbo & Grossi, 2014). FD sering disebut dengan istilah lain, seperti krisis fiskal, kesulitan keuangan, risiko fiskal atau ketegangan fiskal (Cohen, et al., 2017). Menurut Trussel & Patrick (2009), FD ialah ketidakseimbangan pendapatan dan pengeluaran dan mengalami defisit selama tiga tahun berturut-turut dengan kumulatif lebih dari 5% (Trussel & Patrick, 2012). Kesulitan keuangan tidak berkembang hanya karena satu alasan. Kerentanan keuangan yang terjadi pada Pemda dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi dan bekerja secara simultan (Cohen et al., 2017). FD terjadi karena tingginya belanja pemerintah (Anessi-Pessina & Sicilia, 2015). Untuk konteks Indonesia, FD pada pemerintah kabupaten/kota diukur dengan data defisit anggaran selama tiga tahun berturut-turut, dimana defisit terjadi apabila jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah beban dalam laporan operasional (LO) Pemda.

Pengaruh Perubahan Anggaran SiLPA terhadap Perubahan Anggaran BBJ

Selisih SiLPA dengan LRA tahun sebelumnya merupakan angka yang menjadi salah satu nilai yang dipertimbangkan untuk melihat perubahan anggaran dalam tahun berjalan, terutama dalam bentuk penyesuaian untuk belanja (Marzalita et al., 2014). Anggaran SiLPA dalam APBD murni merupakan nilai estimasi karena telah ditentukan nilainya sebelum tanggal 31 Desember tahun bersangkutan. Setelah tahun anggaran bersangkutan selesai dan laporan pertanggungjawabannya dalam bentuk laporan keuangan Pemda selesai diaudit oleh BPK maka angka SiLPA dalam hasil audit BPK merupakan angka pasti (final). Artinya, didalam perubahan APBD, angka final yang dicantumkan menggantikan angka SiLPA dalam APBD murni. Selisih kedua angka SiLPA ini merupakan nilai perubahan SiLPA atau sisa anggaran. Besar kecilnya SiLPA sangat ditentukan oleh kemampuan Pemda dalam mengestimasi belanja dan kemampuan SKPD dalam melakukan pertanggungjawaban kegiatan karena sisa anggaran tidak selalu berasal dari kegiatan yang telah selesai 100% (Abdullah, 2013). Oleh karena itu, apabila terjadi perubahan anggaran pada SiLPA maka anggaran BBJ juga berubah untuk menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

H1: Perubahan Anggaran SiLPA berpengaruh terhadap Perubahan Anggaran BBJ

Pengaruh FD terhadap Perubahan Anggaran BBJ

Pemda yang mengalami FD cenderung memiliki ketidakpastian dalam menentukan alokasi belanja daerah sehingga terjadi defisit anggaran secara terus menerus. Menurut Kloha et al., (2005), FD terjadi ketika Pemda tidak mampu memenuhi kebutuhan operasional, membayar utang, dan memenuhi kebutuhan masyarakat selama lebih dari 1 (satu) tahun secara berturut-turut akibat kesenjangan yang besar antara kebutuhan dan kapasitas yang tersedia. FD pemerintah daerah juga didefinisikan sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan pokok maupun bunga pinjaman (Rohman, 2021). Pengalaman di masa lalu sering dijadikan pertimbangan dalam penyusunan dan penyesuaian anggaran selama tahun berjalan (Ansori, 2021). Jika mengalami kesulitan keuangan maka Pemda juga sulit melakukan perubahan anggaran BBJ sebagaimana mestinya.

H₂: FD berpengaruh terhadap Perubahan Anggaran BBJ

Pengaruh Perubahan Anggaran SiLPA terhadap Perubahan Anggaran BBJ dengan FD sebagai Pemoderasi

Pemda yang mempunyai nilai SiLPA besar cenderung akan melakukan perubahan anggaran belanja yang juga besar (Abdullah, 2013a). Pada posisi akhir tahun, semakin besar BBJ yang terealisasi pada tahun tersebut, maka akan semakin kecil SiLPA pada akhir tahun. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil BBJ yang terealisasi maka SiLPA pada akhir tahun akan besar, walaupun pembiayaan neto juga mempengaruhi nilai SiLPA.

Implikasi dari perubahan besaran SiLPA ini adalah penyesuaian terhadap alokasi belanja daerah, termasuk BBJ (Iswahyudin, 2016). Apabila Pemda menganggarkan alokasi pendapatan yang terlalu tinggi, memungkinkan jumlah alokasi belanja juga lebih besar, dan mengakibatkan terjadinya defisit yang lebih besar (Annesi-Pessina & Sicilia, 2015). Defisit menjadi suatu keniscayaan dalam praktik pengelolaan keuangan pemerintah mengingat adanya keterbatasan dalam kepemilikan sumberdaya, sementara kebutuhan atau tuntutan Masyarakat sangat besar atau tidak terbatas. Menurut Ansori (2021), apabila terjadi defisit selama tiga tahun berturut-turut maka Pemda tersebut akan mengalami *financial distress* (FD) atau kesulitan keuangan. FD merupakan konsep keuangan yang multidimensi dan memiliki kaitan dengan banyak variabel lain (Wang et al., 2007). Perencanaan dan penganggaran belanja daerah yang berlebihan dan kurang tepat dapat menyebabkan pemerintah kabupaten/kota mengalami FD (Ansori, 2021).

FD akan membuat Pemda lebih berhati-hati dalam melakukan penyesuaian anggaran, termasuk dalam mengalokasikan perubahan anggaran SiLPA. Jika anggaran SiLPA dalam APBD awal terlalu tinggi, sehingga harus dikurangi besarannya dalam APBD-P, maka akan menyebabkan ada belanja yang juga dikurangi anggarannya, atau paling tidak, tidak mendapatkan tambahan alokasi sumber daya. Menurut Halim & Abdullah (2006) dan Junita & Abdullah (2018), pemerintah daerah selaku eksekutif (pengusul anggaran), menginginkan alokasi sumber daya yang cukup untuk belanja tertentu, yang sesuai dengan preferensi mereka. Hal ini juga berlaku di legislatif atau DPRD, di mana anggota DPRD memiliki kepentingan tersendiri yang diperjuangkan untuk diakomodasi dalam APBD (Abdullah & Halim, 2023).

H₃: FD memoderasi pengaruh Perubahan Anggaran SiLPA terhadap Perubahan Anggaran BBJ.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia dengan jumlah seluruhnya sebanyak 508 pemerintah daerah. Sampel penelitian ini diambil menggunakan metode *purposive sampling technique*, artinya penentuan dan pengambilan sampel ditentukan oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu. Pemda yang dijadikan sebagai sampel memiliki beberapa kriteria, yaitu:

1. Pemda yang mengalami defisit (sebagai indikator *financial distress*/FD) selama 3 tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2016-2018 (merujuk pada studi Ansori, 2021). Sampel ini

menggambarkan bagaimana pemerintah daerah yang mengalami kesulitan keuangan melakukan perubahan anggaran BBJ-nya.

2. Kelengkapan data APBD-P tahun 2019 yang dapat diakses melalui laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan alamat: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. Selain itu, data juga bisa diperoleh dari laman mesin pencari www.google.com dengan kata kunci peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 20xx.

Berdasarkan kriteria tersebut, hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa dari 508 Pemda di Indonesia, yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 42 Pemda (Tabel 2).

Tabel 2.

Sampel Penelitian

No	Pemerintah Kabupaten/Kota	No	Pemerintah Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Gayo Lues	22	Kabupaten Lamongan
2	Kabupaten Samosir	23	Kabupaten Lumajang
3	Kabupaten Serdang Bedagai	24	Kabupaten Gianyar
4	Kota Tanjungbalai	25	Kabupaten Klungkung
5	Kabupaten Solok	26	Kabupaten Alor
6	Kota Pariaman	27	Kabupaten Lembata
7	Kabupaten Bangka Selatan	28	Kabupaten Sumba Barat
8	Kabupaten Way Kanan	29	Kota Kupang
9	Kabupaten Pandeglang	30	Kabupaten Sambas
10	Kabupaten Karawang	31	Kabupaten Kotabaru
11	Kabupaten Subang	32	Kabupaten Gunung Mas
12	Kota Bekasi	33	Kabupaten Kapuas
13	Kota Cirebon	34	Kabupaten Bulungan
14	Kota Tasikmalaya	35	Kabupaten Wajo
15	Kabupaten Banjarnegara	36	Kota Palopo
16	Kabupaten Jepara	37	Kabupaten Konawe
17	Kabupaten Kendal	38	Kabupaten Kepulauan Aru
18	Kabupaten Magelang	39	Kabupaten Maluku Tenggara
19	Kabupaten Rembang	40	Kabupaten Kepulauan Tanimbar
20	Kabupaten Sragen	41	Kabupaten Seram Bagian Timur
21	Kabupaten Tegal	42	Kabupaten Teluk Bintuni

Sumber: Data Penelitian, 2022 (diolah)

Operasionalisasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam studi ini adalah Perubahan Anggaran Belanja Barang dan Jasa (BBJ) sebagai variabel terikat (*dependent variable*, diberi simbol Y), dengan variabel terikat (*independent variable*, diberi simbol X) adalah Perubahan Anggaran SiLPA dan variabel pemoderasi (M) adalah *Financial Distress*. Perubahan Anggaran BBJ merupakan tingkat

penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk anggaran belanja operasional yang digunakan untuk memperoleh barang dan jasa.

- Variabel Perubahan Anggaran BBJ (Y) menggambarkan kebijakan anggaran untuk merevisi besaran alokasi sumberdaya untuk BBJ di Pemda dengan beberapa alasan, terutama untuk menyesuaikan dengan perkembangan selama satu semester pertama dan hasil audit BPK untuk pelaporan keuangan tahun lalu. Variabel ini diukur dengan menggunakan angka selisih antara anggaran BBJ setelah perubahan dengan anggaran BBJ awal atau sebelum perubahan APBD.
- Variabel Perubahan Anggaran SiLPA (X) menggambarkan penyesuaian atas angka SiLPA dalam anggaran awal terhadap hasil audit yang telah dilakukan oleh BPK terhadap pelaporan keuangan Pemda tahun sebelumnya, yang memastikan berapa nilai SiLPA yang sesungguhnya yang dapat digunakan di tahun anggaran berkenaan. Pengukuran untuk variabel ini menggunakan angka selisih antara angka SiLPA dalam LKPD tahun lalu dengan angka SiLPA dalam APBD murni.
- Variabel pemoderasi (M), yakni *Financial Distress* (FD), merupakan variabel yang menggambarkan kondisi keuangan pemerintah daerah selama 3 (tiga) tahun sebelumnya, di mana realisasi Pendapatan daerah lebih rendah dari pada realisasi belanja daerah. Variabel ini diukur dengan menggunakan angka rata-rata dari defisit yang terjadi selama tiga tahun berturut-turut sebelum tahun berkenaan dalam laporan realisasi anggaran (LRA).

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan MRA dengan menggunakan alat statistik SPSS 25.0. Pengujian ini juga menggunakan asumsi klasik yang terdiri Uji Normalitas, Uji Multikolienaritas dan Uji Heterokedastisitas. Penelitian ini menguji pengaruh Perubahan Anggaran SiLPA (X₁) terhadap Perubahan Anggaran BBJ (Y) dengan FD sebagai variabel moderasi (M). Persamaan regresi dapat dituliskan seperti berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 M + e \dots\dots\dots \text{Persamaan 1}$$

dan

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 * M + e, \dots\dots\dots \text{Persamaan 2}$$

dengan Y adalah perubahan anggaran BBJ, α adalah konstanta, β₁, β₂, dan β₃ adalah koefisien regresi, X₁ adalah perubahan anggaran SiLPA, M adalah *financial distress* (FD), dan e adalah *error terms*.

HASIL dan PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan perubahan anggaran SiLPA sebagai variabel independen, perubahan anggaran BBJ sebagai variabel dependen dan FD sebagai variabel moderasi. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 42 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Setelah mengetahui jumlah sampel yang akan digunakan, maka peneliti mendeskripsikan data yang akan diuji.

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS versi 25.0 diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.
Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Perubahan BBJ	-42.818.240,54	718.094.254.467	65.510.810.354,84	119.810.161.673,026
Perubahan SiLPA	-102.490.180.44	172.471.534.329	12.607.048.377,98	55.638.463.233,326
	4			
<i>Financial Distress</i>	-460.088.937.76	-14.063.900.824	131.452.221.936,22	102.579.993.537,740
	8			

Valid N (listwise)

Sumber: Data Penelitian, 2023 (diolah)

Tabel 3. menjelaskan hasil nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi masing-masing variabel penelitian. Variabel Perubahan Anggaran BBJ memiliki nilai minimum sebesar minus Rp42,818 juta yang terjadi pada Kab. Gianyar, nilai maksimum sebesar Rp718 milyar di Kota Bekasi dan nilai rata-rata sebesar Rp65,510 milyar dengan nilai standar deviasi sebesar Rp119,810 milyar. Variabel Perubahan Anggaran SiLPA memiliki nilai minimum sebesar minus Rp102, milyar di Kab. Gianyar, nilai maksimum sebesar Rp172,471 milyar di Kab. Sragen dengan nilai rata-rata yaitu Rp12,607 milyar dan standar deviasi sebesar Rp55,638 milyar. Nilai minimum variabel FD adalah sebesar minus Rp460.088.937,768 yang terjadi pada Kota Bekasi, nilai maksimum sebesar minus Rp14.063.900.824 pada Kab. Gayo Lues dengan nilai rata-rata sebesar minus Rp131.452.221.936,22 dan nilai standar deviasi sebesar Rp102.579.993.537,740.

Asumsi Klasik

Penelitian ini melakukan pengujian dengan menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.
Hasil Uji Asumsi Klasik

No	Nama Uji	Hasil	Kesimpulan
1.	Uji Normalitas (Kolmogrov-Smirnov)	0,065	Normal
2.	Uji Multikolinearitas	Tolerance VIF	
	Perubahan Anggaran SiLPA	0,999 1,001	Tidak terjadi multikolinearitas
	<i>Financial Distress</i>	0,999 1,001	Tidak terjadi multikolinearitas
3.	Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)	Signifikansi	
	Perubahan Anggaran SiLPA	0,122	Tidak terjadi heteroskedastisitas
	<i>Financial Distress</i>	0,000	Terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data Penelitian, 2022 (diolah)

Hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) pada Tabel 4. menunjukkan bahwa nilai signifikan *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,065. Hal ini menunjukkan bahwa data residual dalam model regresi ini layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Hasil uji terhadap variabel Perubahan Anggaran SiLPA dan FD menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dikarenakan nilai *tolerance* > 0,10 dan untuk nilai *VIF* < 10. Artinya, di antara variabel penelitian tidak berkorelasi, dan kekuatan prediksi penelitian ini stabil dan handal. Pada uji heteroskedastisitas, variabel Perubahan Anggaran SiLPA memiliki nilai signifikan sebesar 0,122, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas, sedangkan untuk FD menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,000. Artinya, terjadi masalah heteroskedastisitas pada variabel *financial distress*.

Hasil Pengujian Hipotesis

Analisis linear berganda digunakan untuk mendapatkan koefisien regresi yang akan menentukan apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak. Hasil analisis regresi dapat dilihat pada Tabel 5. berikut ini.

Tabel 5.
Hasil Regresi Linear Berganda

No	Variabel	Nilai Koefisien	Nilai t	Nilai Sig.	Nilai F/Sig.	R/R ² /Adj.R ²
1.	Perubahan SiLPA	0,663	2,614	0,013		
2.	<i>Finacial Distress</i>	-0,693	-5,032	0,000	16,557/0,000	0,678/0,459/0,431
3.	Konstanta	-33887918110,785	-1,475	0,148		

Sumber: Data Penelitian, 2023 (diolah)

Berdasarkan hasil olah data yang disajikan pada Tabel 5, persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = -33887918110,785 + 0,663X - 0,693M + e.$$

Besaran nilai *R-Square* yang diperoleh adalah 0,459 atau 45,90 persen, yang menunjukkan besarnya kontribusi dua variabel bebas, yakni Perubahan Anggaran SiLPA dan *Financial Distress*, terhadap Perubahan Anggaran BBJ sebesar 45,9%. Artinya, sebesar 54,1% penyebab perubahan variabel Y dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini. Pengaruh keseluruhan variabel bebas terhadap variabel terikat signifikan pada level $\alpha=5\%$ yang dapat dilihat pada nilai F sebesar 16,557 dengan nilai sig. sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05).

Masing-masing variabel bebas, yakni Perubahan Anggaran SiLPA dan *Financial Distress* berpengaruh terhadap Perubahan Anggaran BBJ (secara statistik signifikan pada level $\alpha=5\%$). Hal ini dapat dilihat dari besaran nilai *Sig.* variabel Perubahan Anggaran SiLPA (X_1) sebesar 0,013

dan variabel *Financial Distress* (X_2) sebesar 0,000, di mana keduanya lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa

Pengaruh Perubahan Anggaran SiLPA terhadap Perubahan Anggaran BBJ

Hasil penelitian variabel perubahan anggaran SiLPA (lihat Tabel 5) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,013 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,022 > 5,032$) dengan nilai koefisien positif. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa perubahan anggaran SiLPA berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran BBJ pada Pemda di Indonesia dengan interpretasi semakin tinggi nilai perubahan anggaran SiLPA maka semakin tinggi nilai perubahan anggaran BBJ.

Hasil ini sejalan dengan temuan Abdullah (2013), Marzalita (2014), Martunis (2014), dan Iswahyudin (2016), yang menyatakan bahwa perubahan SiLPA berpengaruh positif terhadap alokasi BBJ. Fahrinda & Kuntandi (2022) membuktikan bahwa SiLPA berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja daerah. Artinya, Pemda memang menggunakan SiLPA untuk melakukan penyesuaian anggaran belanja, khususnya BBJ. Menurut Abdullah (2013), penggunaan data perubahan anggaran SiLPA untuk memprediksi perubahan anggaran belanja sangat logis dan sesuai dengan fenomena empiris dalam praktik.

selisih antara estimasi SiLPA dalam anggaran murni tahun berjalan dengan realisasinya di tahun lalu setelah diaudit oleh BPK RI, sangat logis untuk mengubah alokasi belanja. Pemda yang mempunyai nilai SiLPA besar akan mengalami perubahan anggaran belanja yang juga besar. Ramadhan, et al. (2021) menambahkan bahwa sisa anggaran sebelumnya (SiLPA) berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

Menurut teori PET, dalam proses penganggaran, terungkap adanya perubahan prioritas belanja (Jordan, 2002:213). Implikasi dari perubahan besaran SiLPA ini adalah penyesuaian terhadap alokasi belanja daerah, termasuk BBJ. Jika anggaran SiLPA naik maka kemungkinan anggaran BBJ juga akan naik, karena belanja ini relatif mudah direalisasikan, sehingga kemungkinan dapat memperbaiki realisasi atau serapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran. Perubahan anggaran SiLPA akan menyebabkan perubahan alokasi belanja. Semakin besar BBJ yang terealisasi maka akan semakin kecil SiLPA pada akhir tahun begitu juga sebaliknya semakin kecil BBJ yang terealisasi maka SiLPA pada akhir tahun akan besar walaupun pembiayaan netto juga mempengaruhi nilai SiLPA (Abdullah, 2013).

Pengaruh FD terhadap Perubahan Anggaran BBJ

Hasil penelitian pada FD (lihat Tabel 5) menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,022 > 5,032$) dengan nilai koefisien negatif. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa FD berpengaruh negatif terhadap perubahan anggaran BBJ pada Pemda di Indonesia dengan interpretasi semakin tinggi tingkat FD, maka semakin rendah perubahan anggaran BBJ. Pemda yang mengalami FD (kesulitan keuangan) tidak mampu menyediakan dana untuk memberi pelayanan kepada publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan (Jones & Walker, 2007). FD yang tinggi mencerminkan kebutuhan belanja yang besar, namun tidak diimbangi dengan kemampuan dalam memperoleh pendapatan yang seimbang (Ansori, 2021).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Ansori (2021) dan Ilahi, et al. (2021) bahwa FD berpengaruh terhadap belanja karena belanja yang tidak efisien, boros dan berlebihan membuat Pemda mengalami indikasi FD (Park, 2004 & Bisogmo et al., 2017). Karakteristik dasar pelaksanaan anggaran adalah fleksibilitas (naik turun) yang mengharuskan pemerintah untuk melakukan perubahan anggaran dalam menghadapi kejadian tak terduga (Dougherty et al., 2003). Sejalan dengan teori *Punctuated Equilibrium Theory* (PET) bahwa perubahan anggaran terjadi karena kebutuhan prioritas yang muncul dari waktu ke waktu. Organisasi yang belum mampu memegang kebijakan secara stabil dan belum beradaptasi dengan kebutuhan yang berubah-ubah, maka terjadi keseimbangan yang rumit dan berdampak buruk pada proses pembuatan kebijakan. Dalam konteks Pemda, kemungkinan akan berpotensi terjadinya perilaku oportunistik karena menganggarkan alokasi pendapatan yang terlalu tinggi sehingga memungkinkan jumlah alokasi belanja lebih besar dan mengakibatkan terjadinya defisit (Annesi-Pessina & Sicilia, 2015). Apabila terjadi defisit selama tiga tahun berturut-turut maka Pemda tersebut akan mengalami FD (kesulitan keuangan). FD merupakan konsep dimensi keuangan yang memiliki kaitan satu sama lain (Wang, et al., 2007).

Penelitian ini juga melakukan analisis MRA untuk mengetahui ada atau tidak ada pengaruh variabel pemoderasi terhadap hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil pengolahan data dengan menggunakan MRA dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6.

Hasil Moderated Regression Analysis

No	Variabel	Nilai Koefisien	Nilai t	Nilai Sig.	Nilai F/Sig.	R/R ² /Adj.R ²
1.	Perubahan SiLPA (X ₁)	-0,385	-0,937	0,355		
2.	Finacial Distress (X ₂)	-0,473	-3,287	0,002		
3.	SiLPA*FD (X ₃)	0,000000006503	-3,075	0,004	16,584/0,00	0,753/0,567/0,533
4.	Konstanta	3799641330,2	-0,165	0,870		

Sumber: Data Penelitian, 2022 (diolah)

Berdasarkan Tabel 6. persamaan regresi dapat ditulis seperti berikut:

$$Y = -3799641330,267 - 0,385X_1 - 0,473X_2 - 0,000000006503X_3 + e.$$

Hasil analisis menunjukkan bahwa FD sebagai pemoderasi memperkuat pengaruh perubahan anggaran SiLPA terhadap perubahan anggaran BBJ (secara statistik signifikan pada $\alpha=5\%$ dengan nilai F sebesar 16,584 dan nilai sig. sebesar 0,000). Secara Bersama-sama, ketiga variabel tersebut memberikan pengaruh sebesar 56,7% terhadap Perubahan Anggaran BBJ untuk

data pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Pada persamaan regresi linier berganda sebelumnya, tanpa variabel pemoderasi, besaran nilai R^2 adalah sebesar 45,90 persen, lebih rendah dari setelah ditambahkan variabel pemoderasi (SiLPA*FD).

Pengaruh Perubahan Anggaran SiLPA terhadap Perubahan Anggaran BBJ dengan FD sebagai Pemoderasi

Hasil penelitian variabel pemoderasi (hasil interaksi antara variabel Perubahan Anggaran SiLPA dengan variabel *FD*) pada Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,004 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,022 > 3,075$) dengan arah koefisien negatif. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa *FD* mampu “merevisi” besaran pengaruh Perubahan Anggaran SiLPA terhadap perubahan Anggaran BBJ pada Pemda di Indonesia. Artinya, semakin besar nilai *FD* maka semakin kecil perubahan yang terjadi pada SiLPA dan BBJ. Salah satu karakteristik *FD* ialah ketidaksesuaian antara sumber daya yang tersedia dengan pengeluaran yang dibutuhkan untuk pelayanan publik (Capalbo & Grossi, 2014). Hal tersebut berkaitan dengan sumber jumlah SiLPA yang berasal dari target pendapatan yang berlebihan, penghematan alokasi belanja dan sisa uang yang dibelum dibayarkan karena ada kegiatan yang belum selesai/diserahterimakan kepada Pemda (Abdullah, 2013). Jika terus dibiarkan maka akan sulit untuk mempertahankan pelayanan publik (Badu & Li, 1994). Kesulitan keuangan (*financial distress*) tidak berkembang hanya karena satu alasan tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi dan bekerja secara simultan (Cohen et al., 2017).

Perubahan anggaran belanja dapat menjadi gambaran dari perubahan target pelayanan publik dan orientasi perencanaan pembangunan daerah, setidaknya untuk waktu jangka pendek (Junita, 2015), serta adanya kebijakan dari pemerintahan yang lebih tinggi (Ritonga & Buanaputra, 2023). Abdullah (2013) menyatakan bahwa perubahan alokasi untuk BBJ dapat disebabkan adanya perubahan atau varian SiLPA, sebagai akibat prediksi atas SiLPA yang tidak akurat.

Regulasi yang ada menegaskan bahwa SiLPA dapat digunakan untuk menutupi defisit, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, atau membiayai belanja langsung serta mendanai kewajiban lainnya yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran terdahulu (Abdullah, 2013). Ketika besaran realisasi surplus atau defisit dalam APBD berjalan berbeda dengan yang telah ditetapkan sejak awal tahun anggaran, maka diperlukan penyesuaian untuk penerimaan pembiayaan, setidaknya dapat mengkoreksi penerimaan apa saja yang bersumber SiLPA (Junita, 2015).

Teori PET menunjukkan gagasan yang berbeda dalam proses kebijakan dengan menekankan bentuk stabilitas, aturan, penyesuaian tambahan, dan perubahan kebijakan tidak selalu dapat diprediksi (Baumgartner & Jones, 1993). Besaran sisa anggaran tahun sebelumnya yang ditetapkan untuk tahun anggaran berjalan biasanya belum pasti atau masih dalam bentuk ramalan (*forecast*) sehingga perlu kajian yang lebih jauh (Abdullah & Rona, 2014). Kualitas penganggaran yang buruk merupakan akibat dari intervensi politik dan oportunistik *budget actors* yang ada dalam proses penyusunan anggaran tersebut, baik dari eksekutif maupun legislatif. Abdullah & Halim (2023) menegaskan bahwa keterlibatan DPRD dapat memberikan pengaruh

besar terhadap komposisi dan postur APBD, termasuk dalam pencapaian target-target anggaran, yang berdampak pada kinerja Pembangunan daerah.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Perubahan Anggaran SiLPA terhadap Perubahan Anggaran BBJ dengan *Financial Distress* (FD) sebagai variabel moderasi. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa perubahan anggaran SiLPA dan FD berpengaruh terhadap Perubahan Anggaran BBJ. Begitu juga dengan hasil analisis MRA, bahwa FD mampu memoderasi pengaruh Perubahan Anggaran SiLPA terhadap Perubahan Anggaran BBJ pada Pemda di Indonesia. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa perubahan anggaran penting dilakukan untuk memperbaiki kinerja anggaran dan juga mengurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada akhir tahun, yang akan menjadi SiLPA pada awal tahun berikutnya.

Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, di antaranya: *pertama*, penggunaan sampel kecil. Hal ini terjadi karena data yang digunakan bersumber dari LKPD tahun 2019, dengan kriteria Pemda yang mengalami defisit dalam LO tiga tahun berturut-turut. *Kedua*, menggunakan data sekunder yang terbatas, yakni hanya satu tahun anggaran. Sementara, terdapat hubungan antara tahun anggaran n dengan tahun anggaran $n+1$, yakni melalui angka SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) di tahun ke n yang berubah bentuk menjadi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya) di tahun ke $n+1$. *Ketiga*, menggunakan model regresi dengan hanya satu variabel bebas, sementara dalam studi terdahulu ditunjukkan bahwa perubahan anggaran belanja daerah dipengaruhi oleh banyak faktor (Abdullah, 2013; Marzalita, et al., 2014; Martunis, et al., 2014; Junita, 2015; Abdullah, et al., 2020). Penambahan predictor lain, seperti perubahan pendapatan asli daerah (PAD), perubahan dana bagi hasil (DBH), dan perubahan belanja lainnya (yang digeser ke alokasi BBJ)

Implikasi penelitian ini adalah perlunya pemerintah daerah membuat kebijakan terkait dengan penggunaan SiLPA dalam anggaran perubahan. Hal ini secara implisit ada dalam teori PET, terutama dalam konteks perubahan anggaran daerah. Masalah keagenan yang terjadi mestinya bisa diselesaikan pada saat perubahan anggaran, sehingga perubahan tersebut bukan hanya sekedar pengesahan atas “rencana-rencana” yang telah diskenariokan sebelumnya dalam dokumen perencanaan. Perlunya memperhatikan alasan dilakukan perubahan anggaran terkait dengan anggaran BBJ. Adanya “perubahan” sudah direncanakan sejak awal, misalnya dengan cara menggelembungkan anggaran, terutama untuk kegiatan yang selesai dilaksanakan sebelum perubahan anggaran, untuk kemudian “digeser” ke kegiatan lain yang anggarannya dianggap masih kurang. Pelaksanaan kegiatan biasanya mulai dilaksanakan di triwulan kedua karena di triwulan pertama pemerintah daerah masih menyiapkan kelengkapan administrasi keuangan dan proses pengadaan barang dan jasa (*tendering*), sehingga ada beberapa kegiatan yang bersifat rutin dan ada juga kegiatan yang boleh penunjukan langsung.

Pada saat terjadi pandemi Covid-19 di tahun 2020, kebijakan perubahan anggaran mengalami perubahan dikarenakan adanya “intervensi” dari Pemerintah Pusat. Intervensi tersebut

menegaskan bahwa perubahan anggaran, yang kemudian disebut dengan istilah “penyesuaian anggaran”, tidak perlu dibahas dengan lembaga legislatif atau DPRD, agar *refocusing* dan realokasi anggaran dapat dilakukan lebih cepat. Kecenderungan daya tahan keuangan pemerintah daerah juga berubah pasca pandemi tersebut (Ahrens & Ferry, 2020).

Beberapa rekomendasi untuk studi berikutnya adalah, *pertama*, dapat menggunakan pendekatan *mixed method* untuk tujuan mendalami aspek keperilakuan dalam proses perubahan anggaran pada Pemda di Indonesia. *Kedua*, kajian tentang perubahan yang disebabkan oleh kejutan (*shock*), seperti bencana pandemi Covid-19 dapat dilakukan, mengingat kebijakan terhadap perubahan atau penyesuaian anggaran selama tahun 2020 diatur berbeda dengan tahun normal (misalnya tahun 2019) oleh pemerintah pusat. Meskipun demikian, temuan Ritonga & Buanaputra (2023) menemukan bahwa instruksi dari Pemerintah Pusat tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh pejabat di pemerintah daerah karena para pejabat tersebut lebih suka mengikuti kebiasaan atau rutinitas yang mereka lakukan selama ini.

Ketiga, penelitian selanjutnya juga dapat membandingkan hasil penelitian yang menggunakan data pada Pemda yang menerapkan status otonomi khusus (Otsus) dengan yang tidak berstatus otonomi khusus. Hal ini terkait dengan kemandirian daerah sebagai penerima dana Otsus yang menjadi sumber pendanaan penting bagi pemerintah daerah yang berstatus otonomi khusus. Daerah yang memiliki status oronomi khusus adalah provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Selain itu ada daerah lain yang berstatus istimewa, yakni Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

Keempat, menambah variabel bebas, misalnya perubahan anggaran pendapatan asli daerah atau PAD (Martunis, 2014; Amran, et al., 2015), dana bagi hasil atau DBH (Amran, et al., 2015), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal dikarenakan penyesuaian terhadap penggunaan dana yang berasal dari perubahan anggaran pendapatan tersebut merupakan kewenangan pemerintahan daerah dan ditetapkan dengan Perda. *Kelima*, memasukkan aspek politik dalam proses perubahan anggaran, dimana lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) memiliki kewenangan untuk membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang perubahan APBD. Semakin besar jumlah anggota DPRD dan semakin paham mereka tentang tugas dan fungsinya, maka perubahan anggaran belanja akan semakin dinamis dan dari aspek besaran angka perubahan akan lebih tinggi (Abdullah, 2012).

Terakhir, terkait dengan perilaku pemerintah daerah dalam mengalokasikan pendapatan sendiri (PAD) dan pendapatan transfer, terutama DAU dan DBH, ke dalam belanja daerah. Swasito (2021) dan beberapa studi lain menyatakan bahwa terjadi fenomena *flypaper effect* dalam penganggaran daerah, namun tidak menegaskan bahwa fenomena ini juga berlaku untuk perubahan anggaran. Selain itu, fenomena semakin sentralistisnya kebijakan dana transfer, terutama pemberian label atau *tagging* terhadap DAU menyebabkan tekanan fiskal yang dirasakan Pemda semakin berat. *Tagging* yang dilakukan Pemerintah Pusat terhadap DAU menyebabkan ruang untuk membuat diskresi anggaran bagi Pemda semakin terbatas, sehingga kemampuan Pemda untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas semakin rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2012). Perilaku Oportunistik Legislatif dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya: Bukti Empiris dari Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. *Disertasi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Muda.
- Abdullah, S. (2013a). Pengaruh SiLPA terhadap Belanja. Link: <https://syukriy.wordpress.com/2013/12/16/pengaruh-silpa-terhadap-belanja/>.
- Abdullah, S. (2013b). Perubahan APBD. Link: <https://syukriy.wordpress.com/2013/04/22/perubahan-apbd/>.
- Abdullah, S. (2013c). Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah: Penjelasan Empiris dari Perspektif Keagenan. <https://syukriy.wordpress.com/2016/11/26/analisis-varian-anggaran-pemerintah-daerah-penjelasan-empiris-dari-perspektif-keagenan/>.
- Abdullah, S. (2018). *Penganggaran Pemerintah Daerah: Regulasi, Teori, dan Praktik*. Banda Aceh: PT. Aceh Media Grafika.
- Abdullah, S. & Halim, A. (2023). *DPRD dan Penganggaran Daerah*. Yogyakarta: UGM Press.
- Abdullah, S. & Rona, R. (2014). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 7(1), 179–202. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v7i1.1106>.
- Abdullah, S. & Junita, A. (2016). Bukti Empiris tentang Pengaruh Budget Ratcheting terhadap Hubungan Antara Pendapatan Sendiri dan Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Aceh. *MODUS*, 28(2): 185–201. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.850>.
- Abdullah, S. & Junita, A. (2020). Determinan Kinerja Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah. *Akuntabilitas*, 13(1): 109–124. <https://doi.org/10.15408/akt.v13i1.14953>.
- Abdullah, S., Kusyanti, Y., & Nadirsyah, N. (2020). Perubahan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 11(1): 26-48. DOI: <https://doi.org/10.22373/jep.v11i1.60>.
- Aditya, N.Y. & Dirgantari, N. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2013-2015. *Kompartemen*, XV(1): 42–56. <http://dx.doi.org/10.30595/kompartemen.v15i1.1378>.
- Ahrens, T. & Ferry, L. (2020). Financial Resilience of English Local Government in the Aftermath Of COVID-19. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 32(5): 813-823. DOI: <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0098>.
- Alesani, D. (2012). Rethinking Budgeting as a Continuous Process. *Public Administration Review*, 1–2. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02644.x>.
- Alshoubaki, W. & Harris, M. (2020). Jordanian Public Expenditures: Dynamics, Incrementalism and Punctuated Equilibrium in *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*, 1–9. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_4117-1.
- Amran, A., D. Darwanis, & Syukriy Abdullah. (2015). Pengaruh Perubahan Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial: Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. 4(1): 1-10.
- Anessi-Pessina, E. & Bergamo, U. (2013). Rebudgeting: Scope, Triggers, Players. *Budgetary Research Review*, 5(1): 15–29. <http://hdl.handle.net/10419/157649>.

- Anessi-Pessina, E. & Sicilia, M. (2015). Biased Budgeting in the Public Sector: Evidence from Italian Local Governments. *Local Government Studies*, 41(6): 819–840. DOI: <https://doi.org/10.1080/03003930.2015.1012194>.
- Anessi-Pessina, E., Sicilia, M., & Steccolini, I. (2008). *Rebudgeting in Italian Local Governments: Magnitude, Processes and Drivers*. Link: https://iris.unibocconi.it/bitstream/11565/3841896/1/3841896_paper.pdf.
- Ansori, A. (2021). Pengaruh Pendapatan, Belanja dan Kualitas Audit terhadap Financial Distress Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Disertasi*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Badu, Y.A. & Li, S.Y. (1994). Fiscal Stress in Local Government: A Case Study of the Three-Cities in the Commonwealth of Virginia. *The Review of Black Political Economy*, 22(3), 5–17. DOI: <https://doi.org/10.1007/BF02689969>.
- Bisogno, M., Cuadrado-Ballesteros, B., & García-Sánchez, I.M. (2017). Financial Sustainability in Local Governments: Definition, Measurement and Determinants, in *Financial Sustainability in Public Administration: Exploring the Concept of Financial Health*, 57–83.
- Bumgarner, M., Vazquez, J.M., & Sjoquist, D. (1991). Municipal Capital Maintenance and Fiscal Distress. *Review of Economics & Statistics*, 73(1): 33. DOI: <https://doi.org/10.2307/2109684>.
- Baumgartner, F.R. & Jones, B.D. (1993). *Agendas and Instability in American Politics*. Chicago: University of Chicago Press.
- Capalbo, E. & Grossi, G. (2014). Assessing the Influence of Socioeconomic Drivers on Italian Municipal Financial Destabilization. *Public Money and Management*, 34(2), 107–114. DOI: <https://doi.org/10.1080/09540962.2014.887518>.
- Citi, M. (2013). EU Budgetary Dynamics: Incremental or Punctuated Equilibrium? *Journal of European Public Policy*, 20(8): 1157–1173. DOI: <https://doi.org/10.1080/13501763.2012.760333>.
- Cohen, S., Costanzo, A., & Manes-rossi, F. (2017). Auditors and Early Signals of financial Distress in Local Governments. *Managerial Auditing Journal*, 32(3), 234–250. DOI: <https://doi.org/10.1108/MAJ-05-2016-1371>.
- Dougherty, M.J., Klase, K.A., & Song, S.G. (2003). Managerial Necessity and the Art of Creating Surpluses: The Budget-Execution Process in West Virginia Cities. *Public Administration Review*, 63(4). DOI: <https://doi.org/10.1111/1540-6210.00310>.
- Douglas, J. W., & Gaddie, R. K. (2002). State Rainy Day Funds and Fiscal Crises: Rainy Day Funds and the 1990–1991 Recession Revisited. *Public Budgeting and Finance*, 22(1), 19–30. DOI: <https://doi.org/10.1111/1540-5850.00063>.
- Fahrinda, Y. & Kuntadi, C. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen* 13(3): 449-456.
- Fernández-i-Marín, X., Hurka, S., Knill, C., & Steinebach, Y. (2019). Systemic Dynamics of Policy Change: Overcoming Some Blind Spots of Punctuated Equilibrium Theory. *Policy Studies Journal*, 50(3): 527-552. DOI: <https://doi.org/10.1111/psj.12379>.
- Flink, C.M. (2017). Rethinking Punctuated Equilibrium Theory: A Public Administration Approach to Budgetary Changes. *Policy Studies Journal*, 45(1): 101-120. DOI: <https://doi.org/10.1111/psj.12114>.

- Forrester, J. p, & Mullins, D. R. (1992). Rebudgeting: The Serial Nature of Municipal. *Public Administration Review*, 52(5): 467–473. Link: <http://www.jstor.org/stable/976806>.
- Forrester, J.P. & Spindler, C.J. (1988). Managing Municipal Services in an Era of Declining Federal Assistance. *Policy Studies Review*, 10(1): 63–84. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1541-1338.1990.tb00066.x>.
- Guragain, H.P. & Lim, S. (2019). Nepalese Budgetary Dynamics: Following Incrementalism or Punctuated Equilibrium? *Public Organization Review*, 19(4): 493–518. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11115-018-0418-6>.
- Halim, Abdul & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemeirntah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. 2 (1):53-64.
- Hendrick, R. (2004). Assessing and Measuring the Fiscal Health of Local Governments: Focus on Chicago Sub-Urban Municipalities. *Urban Affairs Review*, 40(1): 78–114. DOI: <https://doi.org/10.1177/1078087404268076>.
- Honadle, B.W., Costa, J.M., & Cigler, B. (2004). Fiscal Health for Local Governments: An Introduction to Concepts, Practical Analysis, and Strategies. 1–16. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-012354751-4.50002-0>.
- Hou, Y. (2003). What Stabilizes State General Fund Expenditures in Downturn Years-Budget Stabilization Fund or General Fund Unreserved Undesignated Balance?. *Public Budgeting and Finance*, 23(3): 64–91. DOI: <https://doi.org/10.1111/1540-5850.2303004>.
- Illahi, F., Haryati, R., & Silvera, D.L. (2021). The Effect of Financial Independence, Degree of Decentralization and Shopping Harmony in Predicting the Status of Financial Distress of Regency and City Governments in West Sumatra Province 2015-2017. *Pareso*, 3(3), 543–556.
- Iswahyudin, I. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa terhadap Sisa Lebih Anggaran (SiLPA) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. *Jurnal Katalogis*, 4(6):152–168. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6624/5300>.
- Jones, S. & Walker, R.G. (2007). Explanators of Local Government Distress. *Abacus*. 43(3): 396–418. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.2007.00238.x>.
- Jordan, Meagan M. (2002). *Punctuated Equilibrium: An Agenda-Based Theory of Budgeting*. Westport, Connecticut: Quorum Books.
- Junita, Afrah. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 4(2). Link: <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jmk/article/view/2369>.
- Junita, A., Erlina, E., Abubakar, E., & Abdullah, S. (2018). The Effect of Budget Variances on the Local Government Budget Changes with Legislature Size as Moderator. *Academic Journal of Economic Studies*, 4(1), 162–173.
- Kloha, P., Weissert, C. S., & Kleine, R. (2005). Developing and Testing a Composite Model to Predict Local Fiscal Distress. *Public Administration Review*, 65(3): 313–323. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2005.00456.x>.
- Kovari, J. (2016). Applying Punctuated Equilibrium Theory to Municipal and County Operating and Capital Budgets. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 28(4): 405–435. DOI: <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-28-04-2016-B001>.

- Lucier, R.L. & Elkins, D. (2014). Gauging the Strength and Meaning of the 1978 Tax Revolt. *Public Administration Review*, 39(4): 371–379. <https://www.jstor.org/stable/976063>.
- Maher, C.S. & Deller, S.C. (2007). Municipal Responses to Fiscal Stress. *International Journal of Public Administration*, 30(12): 1549–1527. DOI: <https://doi.org/10.1080/01900690701230184>.
- Martunis, M., Darwanis, D., & Abdullah, S. (2014). Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah: Analisis Perubahan APBD Kabupaten/Kota Se-Aceh. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 7(1): 52–57.
- Marzalita, M., Nadirsyah, N., & Abdullah, S. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Belanja Barang dan Jasa pada Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi*, 3(3): 46–58.
- Matzke, L.D. (2020). Punctuated Equilibrium Public Policy Theory. *Student Publication*. 773. https://cupola.gettysburg.edu/student_scholarship/773.
- Mesa-lago, C., & Vidal-Alejandro, P. (2011). The Impact of the Global Crisis on Cuba's Economy and Social Welfare. *Journal of Latin American Studies*, 42(04), 689–717. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0022216X10001331>.
- Pagano, M.A. (1993). Balancing Cities' Books in 1992: An Assessment of city Fiscal Conditions. *Public Budgeting and Finance*, 13(1): 19-39. DOI: <http://dx.doi.org/10.1111/1540-5850.00962>.
- Park, K. (2004). To File or Not File: The Causes of Municipal Bankruptcy in the United States. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 16(2), 228-256, DOI: <https://doi.org/10.1108/jpbafm-16-02-2004-b006>.
- Park, A.Y.S., & Sapotichne, J. (2019). Punctuated Equilibrium and Bureaucratic Autonomy in American City Governments. *Policy Studies Journal*, 48(4): 896–925. DOI: <https://doi.org/10.1111/psj.12333>.
- Paulais, T. (2009). Local Governments and the Financial Crisis: An Analysis. https://www.citiesalliance.org/sites/default/files/Paulais_LocalGovernmentsandtheFinancialCrisis_Eng.pdf.
- Rahayu, N., Darwanis, D., & Abdullah, S. (2014). Variasi Belanja Langsung di Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Banda Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 3(1), 29–37.
- Ramadhan, F., Abdullah, S., Karo-Karo, S.S., & Priantana, R.D. (2021). Determinan Perubahan Anggaran Belanja Daerah: Sebuah Bukti Empiris. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 12(2): 155-166.
- Ritonga, I.T. & Buanaputra, V.G. (2023). Re-budgeting Local Government Budgets to Handle the COVID-19 Pandemic: Indonesia's Experience. *Accounting Forum* DOI: <https://doi.org/10.1080/01559982.2023.2272069>.
- Rohman, Abdul., Daud, Rochmawati & Hakiki, Arista.(2021). Pengaruh *Financial Distress, Idle Cash* dan Opini Laporan Keuangan terhadap Pengelolaan SiLPA Pemerintah Daerah. *Akuntabilitas*. 15(2). DOI: <https://doi.org/10.29259/ja.v15i2.12937>.
- Sari, N., Abdullah, S., & Maryasih, L. (2022). Effect of Fiscal Stress on Changes in Social Aid Shopping with Legislature Size as Moderating Empirical Evidence from Regency/City

- Governments in Sumatra. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 7(3), 269-281. DOI: [10.23917/reaksi.v7i3.19823](https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i3.19823).
- Sebók, M. & Berki, T. (2017). Incrementalism and Punctuated Equilibrium in Hungarian Budgeting (1991-2013). *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 29(2): 151–180. DOI: <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-29-02-2017-B001>.
- Sebök, M. & Berki, T. (2018). Punctuated Equilibrium in Democracy and Autocracy: An Analysis of Hungarian Budgeting Between 1868 And 2013. *European Political Science Review*, 10(4): 589–611. DOI: <https://doi.org/10.1017/S1755773918000115>.
- Syaliha, R. (2021). Pengaruh Fiscal Stress, Rebudgeting in Time Over Budget Calculation (P-SiLPA) dan Legislature Size terhadap Expenditure Change Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019. *Skripsi*. Bogor: Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
- Silvestre, H.M.C., Sá de, G.J.G., & Emmendoerfer, M.L. (2021). Budget Distribution of Brazilian State Governments Based on Citizen Perception: An Analysis in Light of the Punctuated Equilibrium Theory. *Revista Contemporânea de Contabilidade*, 18(47): 18–35. DOI: <http://dx.doi.org/10.5007/2175-8069.2021.e73779>.
- Swasito, A.P. (2021). Apakah Fenomena *Flypaper Effect* Asimetris Terjadi Pada Kebijakan Belanja Pemerintah Daerah? *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* 3(1): 72-80.
- Trussel, J. M., & Patrick, P. A. (2009). A Predictive Model of Fiscal Distress in Local Governments. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 21(4), 578–616. DOI: <https://doi.org/10.1108/jpbafm-21-04-2009-b004>.
- Trussel, J.M., & Patrick, P.A. (2012). A Survival Analysis of U.S. Municipalities in Fiscal Distress. *International Journal of Public Administration*, 35(9): 620–633. DOI: <https://doi.org/10.1080/01900692.2012.661189>.
- Wang, X., Dennis, L., & Tu, Y.S.J. (2007). Measuring Financial Condition: A Study of U.S. states. *Public Budgeting and Finance*, 27(2): 1–21. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2007.00872.x>.
- Widyaningrum, W., Setiawan, D., & Brahmana, R.K. (2019). Factors Affecting Rebudgeting in Local Government: From Organizational Feature to Political Variables. *International Journal of Economics and Management*, 13(1): 139–152.
- Wiguna, K.A. & Jati, I.K. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1): 85–108. DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v28.i01.p04>.
- Wordliczek, L. (2021). Between Incrementalism and Punctuated Equilibrium: The Case of Budget in Poland, 1995-2018. *Central European Journal of Public Policy*, 15(2): 14–30. DOI: <https://doi.org/10.2478/cejpp-2021-0007>.